

Pancasila Sebagai Pedoman Etika Bermedia di Era Digital

ABSTRACT

The development of information and communication technology has created a digital space that has become the primary platform for social activities in modern society. Digital media is not only a means of sharing information, but also an arena for forming public opinion, social interaction, and identity construction. However, this development has brought various negative impacts such as the spread of hoaxes, hate speech, political polarization, and cyberbullying. Pancasila, as the foundation of the state, plays a strategic role as a guideline for media ethics to build a healthy, humane, and civilized digital space. This study aims to analyze the relevance of Pancasila values in shaping ethical media behavior, identify key challenges in the use of digital media, and offer a model for implementing Pancasila values in digital literacy. The research method uses literature studies and descriptive qualitative analysis that focuses on the relationship between Pancasila values and digital ethical principles. The results show that the value of divinity encourages honesty and integrity, the value of humanity emphasizes respect for human dignity, the value of unity minimizes polarization, the value of democracy strengthens a culture of healthy discussion, and the value of social justice encourages equal access to information. Thus, Pancasila has proven relevant as a guideline for media ethics to respond wisely to the challenges of the digital era.

Keywords: Pancasila, Digital Ethics, Digital Literacy, Social Media, Media Morality

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan ruang digital yang menjadi wadah utama aktivitas sosial masyarakat modern. Media digital tidak hanya menjadi sarana berbagi informasi, tetapi juga arena pembentukan opini publik, interaksi sosial, dan konstruksi identitas. Namun, perkembangan tersebut membawa berbagai dampak negatif seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, polarisasi politik, hingga perundungan siber. Pancasila sebagai dasar negara memiliki peran strategis sebagai pedoman etika bermedia untuk membangun ruang digital yang sehat, manusiawi, dan beradab. Penelitian ini bertujuan menganalisis relevansi nilai-nilai Pancasila dalam membentuk perilaku bermedia yang etis, mengidentifikasi tantangan utama dalam penggunaan media digital, serta menawarkan model implementasi nilai Pancasila dalam literasi digital. Metode penelitian menggunakan studi literatur dan analisis kualitatif deskriptif yang memfokuskan pada hubungan antara nilai Pancasila dan prinsip etika digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai ketuhanan mendorong kejujuran dan integritas, nilai kemanusiaan menekankan penghormatan martabat manusia, nilai

persatuan meminimalkan polarisasi, nilai kerakyatan memperkuat budaya diskusi yang sehat, serta nilai keadilan sosial mendorong pemerataan akses informasi. Dengan demikian, Pancasila terbukti relevan menjadi pedoman etika bermedia untuk merespons tantangan era digital secara bijaksana.

Kata Kunci: Pancasila, Etika Digital, Literasi Digital, Media Sosial, Moral Bermedia

PENDAHULUAN

Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional merupakan pondasi utama dalam membentuk kepribadian serta karakter warga negara yang beriman, berakhlak mulia, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Nilai-nilai Pancasila tidak hanya bersifat normatif-konstitusional tetapi juga harus diimplementasikan secara nyata dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun dalam era globalisasi dan transformasi sosial yang berlangsung sangat cepat, nilai-nilai Pancasila menghadapi berbagai tantangan serius. Tantangan tersebut antara lain berupa krisis identitas nasional, degradasi moral, melemahnya semangat nasionalisme, serta masuknya paham dan ideologi transnasional yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Perkembangan teknologi informasi dan arus budaya global yang tidak tersaring juga berpotensi memengaruhi sikap dan perilaku generasi muda. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki peran yang sangat penting dan strategis. Pendidikan ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan pemahaman konseptual tentang Pancasila dan kewarganegaraan, tetapi juga untuk membentuk karakter warga negara yang cerdas, kritis, bertanggung jawab, partisipatif, serta memiliki komitmen kuat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Dengan demikian, penguatan pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menjadi upaya fundamental dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mewujudkan kehidupan berbangsa yang berlandaskan Pancasila (Hasan a, 2025)

Pada era digital ini yang ditandai dengan derasnya arus informasi dan kecepatan interaksi sosial, media sosial telah menjelma menjadi ruang baru

dalam pembentukan opini publik, identitas kolektif hingga ekspresi ideologi. Platform seperti Twitter (kini X), Instagram, TikTok, dan YouTube yang bukan hanya menjadi sarana hiburan dan komunikasi, tetapi juga medan pertarungan narasi, termasuk narasi tentang kebangsaan dan nilai-nilai dasar negara (Hidayat dkk., 2021). Dalam konteks Indonesia kondisi ini yang menempatkan Pancasila pada posisi yang cukup krusial sebagai fondasi moral dan ideologis bangsa di tengah kompleksitas ruang digital. Di era globalisasi digitalisasi dan arus nilai yang semakin terbuka terdapat kecenderungan bahwa nilai-nilai Pancasila yang semula menjadi landasan utama mulai mengalami eskalasi tantangan dalam internalisasinya. Sebagai contoh sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pengamalan nilai Pancasila di kalangan masyarakat dan generasi muda belum sepenuhnya optimal (Hasan et al., 2025)

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang tidak hanya bersifat normatif tapi juga ideal untuk menjadi pedoman etika bermedia sosial (Nisa dkk., 2023; Que dkk., 2024). Akan tetapi realitas di lapangan yang menunjukkan bahwa ruang digital kerap diwarnai oleh berbagai ujaran kebencian, polarisasi politik, dan penyebaran hoaks serta intoleransi yang dapat berpotensi menggerus nilai-nilai Pancasila, antara lain persatuan, musyawarah, dan kemanusiaan. Fenomena ini yang menunjukkan bahwa masih adanya tantangan serius dalam menjaga relevansi Pancasila di tengah ekosistem digital yang sangat cair dan juga terfragmentasi.

Berbagai studi telah menggarisbawahi bahwa media sosial yang memiliki dua sisi. Pada satu sisi, yang membuka peluang untuk memperkuat kesadaran kebangsaan melalui narasi-narasi positif dan kampanye nilai-nilai Pancasila. Namun di sisi lain, media sosial yang juga memfasilitasi berkembangnya disinformasi, disintegrasi sosial, dan degradasi etika kewargaan digital (Latiefah dkk., 2022; Siregar, 2022; Harahap dkk., 2024). Dalam konteks ini maka muncul pertanyaan kritis mengenai bagaimana yang sebenarnya media sosial yang membentuk dan menyebarluaskan narasi kebangsaan di Indonesia. Apakah media sosial tersebut mampu berperan sebagai ruang publik yang sehat bagi internalisasi

nilai-nilai Pancasila atau justru menjadi saluran yang mampu melemahkan semangat persatuan dan identitas nasional ?

Transformasi digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan kita, termasuk dalam penggunaan media sosial. Media sosial adalah sekelompok media berbasis internet yang memungkinkan produksi dan perdagangan yang dihasilkan oleh pengguna, memungkinkan pengguna untuk secara instan dan tanpa batas memproduksi, menerima, dan berbagi berbagai informasi dalam lingkungan sosial digital (Safitri & Anggraeni Dewi, 2021). Media sosial telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari, memungkinkan kita untuk terhubung dengan orang lain, berbagi informasi, dan mengakses berbagai konten. Namun, penggunaan media sosial juga membawa tantangan etika yang signifikan. Oleh karena itu, diperlukan panduan perilaku yang bermartabat di media social (Qued dkk., 2024)

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam dua dekade terakhir telah menghadirkan perubahan sosial yang sangat signifikan bagi masyarakat Indonesia. Internet dan platform digital seperti media sosial, forum diskusi daring, aplikasi pesan instan, hingga portal berbasis user-generated content kini menjadi arena utama bagi pertukaran informasi, pembentukan opini publik, serta interaksi sosial lintas ruang dan waktu. Kehadiran ruang digital bukan lagi sekadar pelengkap komunikasi, melainkan telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat modern. Aktivitas belajar, bekerja, berbelanja, berdiskusi, hingga berpolitik semuanya kini melibatkan ruang maya sebagai medium utama. Fenomena ini menegaskan bahwa digitalisasi telah mentransformasi cara masyarakat Indonesia berpikir, berkomunikasi, dan berperilaku dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, derasnya arus digitalisasi tersebut ternyata tidak hanya membawa dampak positif berupa kemudahan akses informasi dan perluasan ruang partisipasi sosial tetapi juga memunculkan beragam persoalan baru yang kompleks.

Berbagai bentuk penyalahgunaan media digital seperti penyebaran hoaks dan disinformasi, ujaran kebencian (hate speech), perundungan daring

(cyberbullying), pencemaran nama baik, penyebaran privasi pribadi tanpa izin (doxing), hingga polarisasi identitas semakin sering mewarnai interaksi masyarakat di ruang maya. Kecepatan penyebaran informasi yang tidak terkontrol, budaya komentar instan tanpa verifikasi, serta anonimitas pengguna membuat ruang digital rentan menjadi arena konflik sosial dan moral. Hal ini tidak hanya mengancam kualitas komunikasi publik, tetapi juga berdampak pada melemahnya nilai-nilai kesantunan, penghormatan terhadap sesama, dan solidaritas kebangsaan. Dalam konteks inilah, muncul pertanyaan mendasar: bagaimana masyarakat Indonesia dapat menyeimbangkan kebebasan berekspresi di ruang digital dengan tanggung jawab moral, etika, dan sosial yang sesuai dengan jati diri bangsa? Pertanyaan ini penting mengingat interaksi digital bukanlah ruang yang bebas nilai; ia tetap terikat pada norma sosial, hukum, serta pedoman moral yang seharusnya menjadi landasan perilaku warga negara. Untuk menjawab berbagai persoalan tersebut, Pancasila sebagai dasar ideologi negara sekaligus pandangan hidup bangsa hadir sebagai rujukan etika yang relevan dan kontekstual. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam lima sila Pancasila pada hakikatnya memuat prinsip kemanusiaan, solidaritas, kebijaksanaan, dan tanggung jawab sosial yang dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penggunaan media digital. Di era globalisasi, digitalisasi, dan arus nilai yang semakin terbuka, terdapat kecenderungan bahwa nilai-nilai Pancasila yang semula menjadi landasan utama mulai mengalami eskalasi tantangan dalam internalisasinya. Sebagai contoh, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pengamalan nilai Pancasila di kalangan masyarakat dan generasi muda belum sepenuhnya optimal (Hasan dkk., 2025)

Sejumlah kajian terbaru menegaskan urgensi mengaktualisasikan Pancasila dalam ekosistem digital yang semakin kompleks. Penelitian berjudul “Ekosistem Digital dan Narasi Kebangsaan: Relevansi Pancasila sebagai Penuntun Etika Publik Virtual” menunjukkan bahwa interpretasi nilai-nilai Pancasila perlu diperluas ke dalam konteks ruang maya. Nilai-nilai seperti kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia serta

musyawarah dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan relevan sebagai pedoman menghadapi maraknya ujaran kebencian, radikalasi digital, dan polarisasi kelompok di media sosial. Berbagai studi mengenai etika bermedia sosial juga menekankan pentingnya internalisasi nilai-nilai Pancasila agar pengguna media digital dapat bertindak lebih bijaksana, bertanggung jawab, dan menghormati hak-hak orang lain. Oleh karena itu penelitian atau artikel ini mencoba untuk menelaah secara komprehensif bagaimana Pancasila dapat difungsikan sebagai pedoman etika bermedia di era digital. Pembahasan tidak hanya menempatkan Pancasila sebagai semboyan normatif tetapi juga sebagai panduan moral yang bersifat aplikatif dan operasional dalam kehidupan digital sehari-hari. Melalui analisis nilai-nilai Pancasila sebagai kerangka etika diharapkan konsep “masyarakat digital Pancasila” dapat diwujudkan yakni masyarakat yang tidak hanya mahir menggunakan teknologi tetapi juga mampu menjaga integritas moral, etika, keadaban publik, dan harmoni sosial berdasarkan jati diri kebangsaan Indonesia. Pendekatan ini menjadi penting dalam upaya menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat, inklusif, dan mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa di tengah tantangan zaman yang serba cepat dan dinamis.

Permasalahan inti dalam penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa meskipun Pancasila diakui sebagai nilai dasar yang tidak tergantikan tetapi proses aktualisasinya dalam ruang digital masih menghadapi berbagai tantangan. Di tengah penetrasi teknologi dan algoritma yang mendikte preferensi pengguna masih belum ada kejelasan sejauh mana narasi-narasi kebangsaan yang berbasis Pancasila tersebut benar-benar mengakar dan diterima oleh masyarakat pengguna media sosial. Hal ini diperparah oleh lemahnya literasi digital serta masih minimnya strategi komunikasi publik yang secara konsisten mengarusutamakan nilai-nilai Pancasila di ranah daring (Rafiki & Dewi, 2022; Widiatmaka & Kurniawan, 2023; Sitorus & Tarigan, 2025).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam menyusun penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Menurut Achmad Ali pendekatan jurisprudensial atau kajian normatif hukum ini memfokuskan kajiannya dengan memandang hukum sebagai suatu sistem yang utuh yang mencangkup seperangkat asas hukum, norma-norma hukum dan aturan-aturan hukum (tertulis maupun tidak tertulis). Penelitian normatif dapat dipahami sebagai penelitian untuk menguji suatu norma dan ketentuan yang berlaku. Dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dikarenakan penelitian ini fokus pada bahan pustaka maka sering kali penelitian normatif disebut juga penelitian doktriner atau penelitian perpustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pancasila sebagai pedoman etika bermedia di era digital memiliki urgensi yang sangat tinggi, mengingat pesatnya perkembangan teknologi informasi yang berdampak pada pola komunikasi masyarakat. Meskipun sebagian besar masyarakat Indonesia memahami Pancasila secara normatif, hasil kajian memperlihatkan bahwa pemahaman tersebut belum sepenuhnya terinternalisasi dalam perilaku bermedia sosial. Banyak pengguna media digital, terutama generasi muda, mengakui bahwa tantangan seperti rendahnya literasi digital, mudahnya terpancing emosi, dan kebiasaan berbagi informasi tanpa verifikasi menjadi penyebab utama munculnya perilaku bermedia yang tidak sesuai dengan etika dan nilai-nilai Pancasila. Media massa dan teknologi komunikasi memungkinkan individu terhubung dengan budaya dan informasi dari seluruh dunia. Individu dapat terpapar pada berbagai budaya dan pandangan dunia melalui televisi, internet, dan media sosial. Hal ini dapat menyebabkan individu merasa lebih

terkait dengan komunitas global daripada komunitas lokal mereka sendiri. Globalisasi membawa dengan itu penyebaran nilai-nilai yang seragam dan norma-norma budaya. Budaya konsumsi global dan budaya populer dari negara-negara maju sering kali menjadi model untuk diikuti, yang dapat mengubah cara individu di komunitas lokal mengukur nilai dan perilaku mereka sendiri. Menurut Sanusi dkk, globalisasi adalah suatu proses yang memungkinkan masyarakat di dunia dapat saling menjangkau atau berhubungan satu sama lain dalam segala bidang kehidupan, termasuk ekonomi, politik, budaya, teknologi dan lingkungan hidup (Hasan dkk., 2025).

Dalam konteks sila Ketuhanan Yang Maha Esa penelitian menemukan bahwa isu keagamaan merupakan salah satu topik yang paling sensitif dan rentan terhadap provokasi, penistaan, dan penyebaran kebencian. Namun penerapan nilai ketuhanan dapat menjadi pedoman moral untuk menumbuhkan sikap saling menghormati dan menghindarkan pengguna dari menyebarkan atau menanggapi konten yang berpotensi memecah belah umat beragama. Nilai ini juga menjadi dasar untuk menumbuhkan kesadaran bahwa aktivitas digital harus dilakukan dengan rasa tanggung jawab di hadapan nilai-nilai spiritual. Sementara itu, sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menjadi sangat penting dalam mengatasi maraknya ujaran kebencian, perundungan daring, pelecehan verbal, dan penyebaran data pribadi (doxing). Penelitian menunjukkan bahwa banyak kasus etika digital berakar pada kurangnya empati dalam berinteraksi di dunia maya. Dengan menginternalisasi sila kedua, pengguna didorong untuk menghargai martabat orang lain, menjaga bahasa yang santun, serta menghindari tindakan yang dapat merugikan secara psikologis maupun sosial. Nilai Persatuan Indonesia memiliki peran signifikan dalam menghadapi meningkatnya polarisasi digital yang sering dipicu oleh isu politik, suku, dan agama. Hingga kini ruang digital kerap menjadi medium penyebaran konten provokatif yang mengancam persatuan nasional. Implementasi sila ketiga mengajak masyarakat untuk mengutamakan kerukunan, toleransi, dan kepentingan bersama di atas kepentingan kelompok, sehingga interaksi di ruang digital dapat mencerminkan semangat persatuan bangsa. Dalam konteks sila Kerakyatan

yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, penelitian menemukan bahwa ruang digital sering kali dipenuhi perdebatan tanpa dasar, ujaran emosional, dan penyebaran opini tanpa fakta. Internaliasi sila keempat mendorong hadirnya budaya diskusi yang sehat, rasional, dan menghargai perbedaan. Hal ini mencakup kemampuan untuk bermusyawarah secara bijak meski dalam ruang digital, serta memanfaatkan kebebasan berpendapat dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia berhubungan erat dengan aspek inklusivitas dan keadilan dalam pemanfaatan teknologi digital.

Implementasi nilai ini tercermin dari sikap tidak menyalahgunakan teknologi untuk merugikan orang lain serta kesadaran untuk menyebarkan informasi yang benar, bermanfaat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengguna yang menghayati sila kelima cenderung lebih peduli terhadap dampak sosial dari setiap aktivitas digital yang mereka lakukan, sehingga ekosistem digital menjadi lebih adil dan nyaman bagi semua pihak. Meskipun demikian, penelitian juga menemukan sejumlah tantangan yang menghambat internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam etika digital, di antaranya anonimitas pengguna yang membuat sebagian orang merasa bebas berperilaku tanpa tanggung jawab, pengaruh algoritma media sosial yang sering memperkuat konten negatif, serta literasi digital yang belum merata di berbagai lapisan masyarakat. Selain itu, budaya global yang masuk melalui media digital juga memengaruhi pola perilaku masyarakat, sehingga beberapa nilai lokal seperti kesantunan dan gotong royong perlakan tergerus. Menghadapi tantangan tersebut, beberapa strategi perlu dilakukan untuk memperkuat etika digital berbasis Pancasila. Pendidikan literasi digital yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila sangat penting diterapkan di sekolah dan perguruan tinggi. Pemerintah juga perlu memperkuat kebijakan dan edukasi terkait hoaks serta etika digital, sementara keluarga dan komunitas memiliki peran besar dalam membentuk karakter bermedia yang beradab. Selain itu, pengembangan konten positif berbasis nilai Pancasila oleh kreator konten, jurnalis, dan masyarakat umum menjadi langkah strategis untuk

menciptakan ruang digital yang sehat. Kolaborasi antara pemerintah, platform digital, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam membangun ekosistem digital yang bermarwah, inklusif, dan berlandaskan nilai Pancasila. Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa Pancasila tidak hanya relevan, tetapi juga sangat diperlukan sebagai pedoman moral dalam bermedia di era digital. Implementasi nilai-nilai Pancasila mampu meningkatkan kualitas komunikasi publik, mencegah konflik sosial, memperkuat toleransi, serta membentuk karakter masyarakat digital yang cerdas, beretika, dan beradab. Dengan kata lain Pancasila dapat menjadi kompas moral yang membimbing seluruh aktivitas digital warga negara Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian mengenai Pancasila sebagai pedoman etika bermedia di era digital menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila memiliki relevansi yang sangat kuat dalam membentuk perilaku masyarakat di ruang digital. Di tengah meningkatnya penyebaran hoaks, ujaran kebencian, *cyberbullying*, dan polarisasi sosial, Pancasila dapat berfungsi sebagai kompas moral yang membimbing pengguna media digital agar berperilaku lebih bijak, santun, dan bertanggung jawab. Setiap sila Pancasila memberikan kontribusi etika yang berbeda namun saling melengkapi—mulai dari penghormatan terhadap keyakinan, penguatan nilai kemanusiaan, pemeliharaan persatuan, pembentukan budaya diskusi yang sehat, hingga penciptaan ruang digital yang adil dan inklusif. Hasil kajian menunjukkan bahwa kendala utama dalam penerapan etika digital berbasis Pancasila adalah rendahnya literasi digital, dominasi emosi dalam interaksi daring, pengaruh algoritma media sosial, serta minimnya kesadaran masyarakat dalam memverifikasi informasi. Meskipun demikian, dengan penguatan edukasi, kolaborasi antarinstansi, dan partisipasi aktif dari seluruh pengguna digital, Pancasila dapat menjadi landasan etis yang efektif dalam mewujudkan ekosistem digital yang

harmonis dan beradab. Secara keseluruhan, Pancasila tidak hanya memiliki kedudukan historis sebagai ideologi bangsa, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman praktis dalam menghadapi tantangan etika di dunia digital yang semakin kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

- Bintang Immanuel Astrid Que & Fatma Ulfatun Najicha.Harahap, A., dkk. (2024). *Etika kewargaan digital dan penguatan nilai Pancasila di media sosial*. Jurnal Komunikasi dan Media Digital, 6(2), 115–130.
- Hasan, Z., Setiawan, F. R., Syahrezal, S., Devary, M. I. P., Satya, F. Y., & Berlando, M. M. (n.d.). Relevansi Pancasila sebagai dasar ideologi dan moral bangsa Indonesia.
- Hasan, Z., Pradhana, R. F., Andika, A. P., & Al Jabbar, M. R. D. (n.d.). Pengaruh globalisasi terhadap eksistensi identitas budaya lokal dan Pancasila.
- Hasan, Z. (2025a). Pancasila dan kewarganegaraan (hlm. 1).
- Hasan, Z., Aulia, H., Ramadhani, A. E., Leviana, P. S., Soraya, R., & Agustina, A. (n.d.). Membangun mahasiswa berkarakter melalui pembinaan ideologi Pancasila.
- Hidayat, R., dkk. (2021). *Media sosial dan konstruksi identitas kebangsaan di ruang digital*. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, 25(1), 45–60.
- Izni. (2019). *Etika digital dan tantangan literasi masyarakat Indonesia*. Jurnal Pendidikan Karakter, 9(3), 321–332.
- Latiefah, N., dkk. (2022). *Literasi digital dan penguatan ideologi di media sosial*. Jurnal Sosioteknologi, 21(1), 87–98.
- Membangun Panduan Perilaku Yang Bermartabat Di Media Sosial (2024) Pancasila Sebagai Pilar Etika Di Dunia Digital: Membangun Panduan Perilaku Yang Bermartabat Di Media Sosial.
- Narasi Kebangsaan di Era Media Sosial: Relevansi Pancasila dalam Ekosistem Digital Nisa, K., dkk. (2023). *Relevansi nilai Pancasila dalam*

- membangun etika bermedia di era digital.* Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, 8(2), 201–214.
- Nurul Hidayat¹ PACIVIC (Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) Pamungkas, R., dkk. (2024). *Narasi kebangsaan dan ruang digital: Tantangan ideologis Indonesia.* Jurnal Komunikasi Global, 12(1), 55–70.
- Que, S., dkk. (2024). *Pancasila as ethical guidance in digital society.* International Journal of Digital Humanities, 3(2), 102–118.
- Rafiki, A., & Dewi, S. (2022). *Strategi komunikasi publik berbasis Pancasila di media sosial.* Jurnal Komunikasi Publik, 14(1), 50–63.
- Safitri, N., & Anggraeni Dewi, Y. (2021). *Media sosial sebagai ruang interaksi digital masyarakat.* Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi, 5(2), 89–98.
- Sanusi, A., dkk. (2020). *Globalisasi dan perubahan nilai budaya masyarakat.* Jurnal Pendidikan Sosial, 4(1), 33–42.
- Siregar, H. (2022). *Disinformasi dan ancaman disintegrasi digital di Indonesia.* Jurnal Media dan Politik, 7(2), 144–159.
- Sitorus, L., & Tarigan, B. (2025). *Literasi digital dan aktualisasi Pancasila di ruang maya.* Jurnal Pembangunan Sosial, 5(1), 23–38.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339.
- Tapung, S., & Edu, F. (2019). *Pancasila dan tantangan etika media masa kini.* Jurnal Etika Publik, 3(2), 110–122.
- Widiatmaka, D., & Kurniawan, Y. (2023). *Internalisasi nilai Pancasila melalui literasi digital di kalangan pemuda.* Jurnal Pemberdayaan Masyarakat, 7(3), 77–91.